

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- A.A. Andi Prajitno. 2018. *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*. Seri A. CV. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2021. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana.
- Darwan Prinst. 1992. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Cetakan ke-1. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Cetakan ke-2 Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Gr. Van Der Burght, Freddy Tengker, Ed Wila Chandrawila Supriadi. 2012. *Buku tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*. Cetakan ke-2. Bandung: CV. Mandar Maju.
- H. Bachrudin, H. Gunarto, dan H. Eko Sponyono. 2019. *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Cetakan ke-1, Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Bachrudin. 2019. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-2 Penerbit Alumni, Bandar Lampung
- H. Richard dan Suyanto. 2021. *Teknik Pembuatan Akta Edisi Lengkap (TPA I, II, III)*. Cetakan ke-2. Bandung: Cendekia Press.
- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Cetakan ke-1. Bandung: Mandar Maju.
- Herry Susanto. 2010. *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: FH UII Press.
- Irwansyah dan Ed Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Ivo Dewi Kumalawati, Herowati Poesoko, dan Ivida Dewi Amrih Suci. 2021. *Hukum Kenotariatan Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Laksbang Pustaka.
- M. Fauzan. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media.

- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan ke-11. Bandung: CV. Mandar Maju,
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-9. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cetakan ke-9. Bandung: Sumur.
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Lelang*, Cetakan ke-1, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ria Trisnomurti. 2019. *Notaris dan Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cetakan ke-1. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ronald Saija. 2013. *Arsitektur Praktik Peradilan Perdata*. Cetakan ke-1. Jakarta: Mitra Sahabat.
- Salim HS. 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjaifurrachman dan Ed. Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cetakan ke-1. Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-4. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Alumni.
- Titik Tejaningsih. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: FH UI Press.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Rineka Cipta

2. Peraturan

Burgerlijk Wetboek

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Jurnal dan Artikel

Febri Rahmadhani. 2020. *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Recital Review, Vol. 2 No. 2. Magang di Kantor Notaris/PPAT Syahrit Tanzil. Jambi.

Gleand Maryo Weller, Dientje Rumimpunu, dan Noldy Mohede. 2021. *Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata*. Jurnal Lex Privatum Vol. IX No. 4. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.

H. Enju Juanda. 2016. *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol.4 No.1. Fakultas Hukum Universitas Galuh. Ciamis, Jawa Barat.

Yuli Heriyanti. 2020. *Tinjauan Yuridis tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangkinang)*. Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Riau.

I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, I Gusti Ketut Ariawan, 2015-2016, *Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris dalam Kaitannya dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan,

Acta Comitatus (2016) 2: 280-292, ISSN: 2502-8960 1 e-ISSN: 2502-7573.

4. Sumber lain

Akmal Adicahya. 2021. *Menelusuri Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Artikel dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menelusur-hukum-acara-perdata-di-indonesia-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-m-h-4-2>

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-sumpah-idecisoir-i--isuppletoir-i--dan-iaestimatoire-i-lt5899301425dee>. (Diakses 23 Januari 2022, Pukul 10.37)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-jika-terdapat-kesalahan-dalam-akta-notaris-lt51e49bda7e30d>, (Diakses 17 November 2022, pukul 09.21).

MK 'Rombak' Definisi Saksi dalam KUHP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-definisi-saksi-dalam-kuhp---lt4e400c35027d0>, pukul 04.36 WITA.

Mustahar, 2021, *Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang (the executorial power of the deed of indebtedness acknowledgement)*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

Wahyu Wardhana. 2006. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dari Jual Beli Tanah menurut Hukum Adat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.